



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS), DAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 2 September 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas RKA K/L TA 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2021
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nanik Sulistyawati. S.A.P
Hadir Anggota	: Fisik 31 Orang dan Virtual 17 Orang (48 orang) dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri dan Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi pada hari ini adalah membahas RKA K/L TA 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2021.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran masing-masing kementerian dalam RAPBN TA 2021 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-692 /MK.02/ 2020 dan B.636/ M.PPN/ D.8/ KU.01.01/ 08/ 2020 Tanggal 5 Agustus 2020 Perihal Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO	KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2021	SELISIH
		A	B	(A-B)
1.	Kementerian PUPR	140.325.000.000	149.811.139.618	(9.486.139.618)*
2.	Kementerian Perhubungan	75.754.039.461	45.664.041.141	30.089.998.320
3.	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	4.108.894.870	3.689.809.142	419.085.728

*Terdapat penambahan anggaran antara lain untuk kegiatan ketahanan pangan, infrastruktur kawasan industri dll sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program padat karya akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 02 September 2020

KETUA RAPAT,



LASARUS

MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI



ABDUL HALIM ISKANDAR

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO